BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran publik untuk berbagai proyek dan program yang berkaitan dengan perumahan dan penataan kawasan permukiman. Dari perspektif akuntansi, Dinas ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi berfungsi sebagai alat utama dalam pengawasan dan transparansi keuangan yang dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana negara dalam program perumahan dan permukiman. Dalam menjalankan fungsi tersebut, aspek akuntansi memainkan peranan kunci untuk menjamin bahwa pengelolaan dana publik berjalan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntansi di lingkungan Dinas ini mencakup berbagai bidang mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan dan pengelolaan aset.²

Sebelum era digital, pengelolaan keuangan daerah umumnya masih dilakukan secara manual sekitar awal 2000-an, menggunakan dokumen fisik yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan proses verifikasi, dan menumpuknya arsip yang menghambat efisiensi kerja. Untuk

² “Sistem Informasi Pemerintah Daerah” dalam <https://sipd.kemendagri.go.id/>, diakses 28 Oktober 2024

meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2017, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Aplikasi SIMDA dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi keuangan dan kinerja yang mendukung tata kelola yang baik, pengendalian transaksi, serta penyediaan informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan sifatnya yang generik, SIMDA dapat digunakan secara luas oleh seluruh pemerintah daerah tanpa memerlukan pengembangan aplikasi serupa yang memakan biaya besar. Selain itu, SIMDA menyediakan database terpadu yang mencakup aspek keuangan, aset, kinerja, kepegawaian, dan pelayanan publik untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kapasitas SDM daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.³

Seiringnya berkembang kebijakan, diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. dengan kata lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan

³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 'Pedoman Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).', 2008
<<https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/32/produkLayanan/produk/G2L/sistem-informasi-manajemen-daerah-simda>>.

pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dalam hal ini adalah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, transformasi digital telah menjadi salah satu faktor kunci dalam perubahan paradigma pelayanan publik, terutama di sektor pemerintahan. Di tengah upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, penerapan teknologi informasi menjadi semakin penting, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat yang diadopsi oleh banyak pemerintah daerah adalah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).⁴ Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam operasional pemerintah daerah. Penerapan Sistem

⁴ Nanda Dias Ekaputra, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk", 21. April (2021), 62–64.

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah membantu mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses-proses administrasi di berbagai instansi pemerintah, termasuk di Dinas Sosial.⁵

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Serta meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis data dan informasi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.⁶

Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang juga telah mengimplementasikan aplikasi SIPD untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu tugas penting dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang akurat dan transparan sangat penting untuk memberikan informasi yang tepat kepada pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, instansi pemerintah lainnya, dan pihak eksternal seperti auditor atau badan pengawas keuangan. Namun, penyusunan laporan keuangan yang manual sering kali rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama.

⁵ Sri Widiastuti, dkk, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat", *Ganec Swara*, Vol 17 No.4 (2023), hlm. 2252

⁶ Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado", *A History of Canadian Accounting Thought and Practice*, 2.5 (2020), hlm. 2

Setelah melakukan pra-penelitian di Dinas tersebut, bahwa di temukannya masalah terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Staf mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri masih menggunakan sistem verifikasi secara manual dalam bentuk hardfile atau dokumen fisik, yang menyebabkan penumpukan berkas dan pengelolaan yang kurang efisien. Hal ini diungkapkan oleh bapak Wahyu selaku staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri “*Setelah perubahan menggunakan aplikasi SIPD dari manual, adanya kesulitan dari salah satu staff dikarenakan kurangnya pemahaman penggunaan teknologi*”.⁷ Pengelolaan keuangan yang baik dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan proyek yang direncanakan dapat direalisasikan tanpa adanya pemborosan atau penyalahgunaan dana. Akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengawasi anggaran publik dan memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki landasan keuangan yang kuat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chinda dan Abdul yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif

⁷ Wawancara dengan bapak Wahyu selaku staff Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Pada 8 Juli 2024

dilaksanakan. Karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu belum bisa sepenuhnya menggunakan SIPD dalam kegiatannya karena masih memerlukan aplikasi pendamping dalam beberapa prosesnya. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringan, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadya dan Zuhrizal yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan, dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. Berdasarkan analisa melalui poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan diperoleh bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Ini terlihat jelas bahwa pegawai merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat.⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra yang berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten

⁸ Chinda Aqhni Adisi dan Abdul Sadad, "Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2022

⁹ Nadya Balqis dan Zuhrizal Fadhly, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Public Policy*, Vol. 7 No.2 Tahun 2021

Nganjuk. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen RPJMD yang sudah ada dikarenakan nomenkatur dari program dan kegiatan berubah secara keseluruhan dan juga mempengaruhi output yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk disebabkan oleh aplikasi yang digunakan untuk menginput Program, Kegiatan maupun Sub kegiatan masih belum siap, diduga karena server dari SIPD belum mampu untuk menampung seluruh Daerah ketika akses yang hampir bersamaan yang berakibat menghambat proses input kegiatan yang nantinya akan menjadi dokumen RKPD.¹⁰

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian diatas hanya berfokus terhadap efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan didalam penelitian ini, lebih berfokus terhadap efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi. Pemilihan Kabupaten Kediri sebagai fokus penelitian terhadap efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi, merupakan modul yang

¹⁰ Ekaputra, hal 78

digunakan untuk melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Modul ini mencakup proses pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan daerah.

Dengan adanya penerapan aplikasi SIPD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberikan manfaat dan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penerapan aplikasi SIPD tersebut terhadap bidang Akuntansi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi dan mengukur efektivitas penerapan aplikasi SIPD dalam konteks Bidang Akuntansi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peran dan kontribusi aplikasi SIPD dalam proses pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan. Baik dari segi efisiensi waktu, akurasi, kemudahan penggunaan, dan manfaat lainnya. Beberapa poin utama yang akan dianalisis meliputi dengan keterhubungan data dan informasi, sejauh mana Aplikasi SIPD dapat mengintegrasikan berbagai data dan informasi terkait keuangan daerah, termasuk proses pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan serta persepsi pengguna, bagaimana persepsi para pengguna termasuk staf di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, terhadap efektivitas Aplikasi SIPD dalam mendukung proses pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan. Sebelum Penggunaan

aplikasi SIPD pada sebelumnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri menggunakan sistem verifikasi secara manual, yaitu berbentuk hardfile atau lembaran fisik, hingga jadi penumpukan yang kurang efisien.

Melalui analisis mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penerapan Aplikasi SIPD. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah lain yang juga sedang berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui teknologi informasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri memiliki peran sentral dalam manajemen keuangan daerah, dan penerapan Aplikasi SIPD dianggap sebagai langkah signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Perubahan regulasi, seperti dikeluarkannya Permendagri No. 70 Tahun 2019, memberikan landasan hukum untuk penggunaan Aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi?
2. Bagaimana integrasi dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi?
3. Bagaimana adaptasi dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi
2. Untuk Mengetahui integrasi dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi
3. Untuk Mengetahui adaptasi dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

b. Batasan Masalah

1. Menetap di tempat obyek penelitian yang bertempat di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri
2. Penelitian akan berfokus pada efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri
3. Data yang dipakai dalam penelitian ini menerapkan data primer dan sekunder. Data primer akan didapat langsung dari informan memakai cara tanya jawab dan wawancara, data sekunder dimiliki berasal dari dokumen berkas di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi

Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri”.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

a. Peneliti

Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan di bidang peneliti dan ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara sistematis. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntansi.

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

Sebagai saran kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sebagai upaya meningkatkan bidang akuntansi dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

c. Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai upaya Bidang Akuntansi.

F. Penegasan Istilah

Untuk penegasan istilah definisi konseptual dalam melakukan riset ini bisa dinyatakan sebagai di bawah ini:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat, atau mujur. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. dengan kata lain efektivitas berfokus pada pencapaian hasil.¹¹ Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai, dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.

2. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, suatu sistem berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, mengelola informasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah,

¹¹ Hijratul Aeni Milenia, dkk, "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, Vol 7 No.2 (2023), hlm. 67

pembiayaan daerah, dan data lainnya yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.¹² SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Akuntansi

Suatu proses mengenali, mengukur dan menghubungkan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Dapat juga diartikan sebagai suatu seni mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas data keuangan dengan cara yang

¹² Florencia Fiona Paat, dkk "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi", *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol 4 No.1 (2023), hlm 8.

berarti.¹³ Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas (seperti perusahaan, organisasi, atau individu) untuk tujuan pengambilan keputusan. Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah, untuk menilai kinerja keuangan, kesehatan perusahaan, serta menentukan strategi bisnis atau kebijakan.

G. Penulisan Sistematika Skripsi

Untuk menjadikan penelitian ini terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang alasan dan gambaran penelitian mengambil topik tersebut menjadi acuan awal suatu penelitian. Pada bab ini nanti terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

¹³ Indra Mahardika Putra, "Pengantar Akuntansi", (Yogyakarta: *Quadrant*), 2017.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau teori-teori dari literature dan buku atau penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian. Di dalam bab ini terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pemaparan data atau hasil wawancara yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang penyajian data mengenai pemahaman informasi atas pertanyaan yang diberikan atau hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui pengamatan, dan menjelaskan temuan-temuan terkait Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Akuntansi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

6. BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dijelaskan makna temuan ini sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan peneliti. Selain kesimpulan dan saran ada pula daftar pustaka yang berisi referensi dan sumber seorang peneliti, lampiran-lampiran seperti foto maupun surat ijin.